Bulan :

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2	0	2	2

SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Warta Kota

APBD 2023 Belum Mumpuni 3 Program Prioritas

DPRD Sebut Kesan Copy Paste Masih Ada

Gambir, Warta Kota

DPRD DKI Jakarta mengkritisi rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2023 yang diajukan Pemprov DKI Jakarta.

Pengawas pemerintah daerah itu menilai, rancangan senilai Rp 85,57 triliun belum mumpuni menangani tiga program prioritas, salah satunya penanggulangan bencana banjir.

Ketua DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Badan Anggaran (Banggar) Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dokumen kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas (KUA-PPAS) untuk APBD tahun 2023 perlu dirasionalisasi.

Harapannya, anggaran kegiatan penanganan banjir tahun depan bisa berjalan efektif.

Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2023, Prasetyo mencontohkan tidak rasionalnya usulan anggaran penanganan banjir di Jakarta Selatan yang hanya disiapkan Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebesar Rp 193 miliar.

Sementara dia menyoroti, begitu banyak kegiatan penanggulangan banjir yang harus dikerjakan pemerintah daerah.

"Padahal pekerjaannya banyak sekali, PR (pekerjaan rumahnya) banyak sekali," ujar Prasetyo dari Fraksi PDI Perjuangan berdasarkan keterangannya pada Selasa (1/11/2022).

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta menjadikan penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan dan antisipasi resesi ekonomi, menjadi tiga program yang diprioritaskan dalam KUA-PPAS APBD tahun 2023.

Dengan rincian, anggaran penanggulangan banjir sebesar Rp 1,29 triliun yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 219 miliar, Jakarta Utara Rp 247 miliar, Jakarta Barat Rp 236 miliar, Jakarta Selatan Rp 193 miliar, Jakarta Timur Rp 296 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 105 miliar.

Penanganan kemacetan sebesar Rp 625 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 111 miliar, Jakarta Utara Rp 130 miliar, Jakarta Barat Rp 122 miliar, Jakarta Selatan Rp 113 miliar, dan Jakarta Timur Rp 149 miliar.

Pengawas pemerintah daerah itu menilai, rancangan senilai Rp 85,57 triliun belum mumpuni menangani tiga program prioritas, salah satunya penanggulangan bencana banjir.

Lalu untuk antisipasi resesi ekonomi tahun depan sebesar Rp 120 miliar yang terdiri dari Jakarta Pusat Rp 21 miliar, Jakarta Utara Rp 17 miliar, Jakarta Barat Rp 20 miliar, Jakarta Selatan Rp 19 miliar, Jakarta Timur Rp 24 miliar, dan Kepulauan Seribu Rp 19 miliar.

Belum Mampu

Dengan postur tersebut, Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Khoirudin juga menilai postur tersebut belum mampu mengeksekusi dengan baik tiga program prioritas yang diusung tahun depan. Apalagi dari nomenklatur yang tampak masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Keseriusan kan dilihat dari anggaran. Kesan copy paste masih ada. Perlu diimbau para Wali Kota agar jangan ragu membuat terobosan untuk menyelesaikan permasalahan secara permanen," kata Khoirudin dari Fraksi PKS.

Dia berharap seluruh Wali Kota dan Bupati dapat membuat terobosan baru yang dapat merealisasi target penyurutan genangan air maksimal enam jam.

Mereka juga harus membuat rencana pelebaran ruas jalan yang sebanding dengan pertumbuhan kendaraan, serta meningkatkan pelatihan kepada para usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk menekan angka pengangguran. (**faf**)